



**LAPORAN
PELAKSANAAN BANTUAN PROFESIONAL
TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)
KABUPATEN/KOTA**

**PUSAT KURIKULUM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2007**

ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah menuntut pelaksanaa otonomi daerah terutama dalam pengelolaan pendidikan yang dari bersifat sentralistik ke desentralistik. Selain itu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga professional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 22, 23, dan 24 tentang Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Pelaksanaan Standar Isi dan Kompetensi Lulusan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Menindaklanjuti surat Edaran Menteri No. 33/2006 butir 3 tentang pembentukan Tim Pengembang Kurikulum di tingkat kabupaten/kota dan Tugas Fungsi Pokok (Tupoksi) Puskurmenuntut Puskur melakukan pemberdayaan TPK kabupaten dengan memberikan layanan profesionalisme agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan di wilayahnya dalam mengembangkan, memverifikasi, dan melakukan monitoring evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Ruang lingkup kegiatan ini adalah pelatihan dan workshop pengembangan KTSP kepada TPK kab/kota yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Kepala dan Guru Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Hasil kegiatan memperoleh informasi bahwa tingkat pemahaman TPK terhadap kebijakan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu terdapat 15 kab/kota yang belum memadai dan masih dalam taraf sosialisasi, sebanyak 17 kab/kota dengan TPK berkemampuan sedang dan perlu dimantapkan, dan satu daerah yang kemampuannya sudah cukup memadai.

Ditemukan bahwa terdapat satu TPK yang sudah terbentuk dengan SK dari Bupati, 25 daerah TPK dengan SK Kepala Dinas, dan tujuh daerah belum membentuk TPK dan sedang disusulkan kepada Bupati/walikota setempat. Dari daerah tersebut hanya beberapa daerah yang telah memiliki progam kerja tahun 2008 tentang sosialisasi KTSP.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini yaitu tingkat pemahaman kebijakan yang belum memadai, jauhnya letak sekolah dengan dinas menyebabkan sulitnya komunikasi, pemilihan tim pengembang kurang obyektif dan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sehingga pelatihan kurang maksimal, keterlibatan komite sekolah dalam mengembangkan KTSP kurang maksimal, belum adanya anggaran khusus dalam pengembangan KTSP menyebabkan lambannya sosialisasi dan pendampingan KTSP kurang maksimal.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan yaitu percepatan pembentukan TPK dan program, serta penyiapan anggaran perlu dilakukan sehingga TPK dapat segera melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan dan pelaksanaan KTSP menjadi lebih optimal.

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
 - 1. Pengembangan Profesionalisme
 - 2. Pengembang Kurikulum
- B. Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Strategi Pelaksanaan

BAB II. HASIL KEGIATAN

- A. Tim Pengembang Kurikulum (Tpk)
- B. Kemampuan Tpk Dalam Menyusun Dokumen Ktsp
- C. Hasil Workshop
- D. Persoalan, Kendala, Dan Hal Lain Yang Dihadapi
- E. Daftar Pertanyaan Yang Sering Muncul Dalam Kegiatan Pelatihan

BAB III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN/REKOMENDASI

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. PENGEMBANGAN PROFESIONALISME

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini diikuti dengan perubahan pengelolaan pendidikan dari bersifat sentralistik ke desentralistik. Desentralisasi pengelolaan pendidikan ini diwujudkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya tuntutan globalisasi dalam bidang pendidikan juga perlu dipertimbangkan agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan hasil pendidikan negara-negara maju.

Selain itu, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) no. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum. Implikasi yang dimaksud adalah pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum.

Sementara itu dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 22, 23, dan 24 tentang Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Pelaksanaan Standar Isi dan Kompetensi Lulusan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan harus segera disosialisasikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh daerah, karena sebagian besar kebijakan yang berkaitan dengan implementasi Standar Nasional Pendidikan dilaksanakan oleh sekolah atau daerah. Sekolah harus menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabusnya dengan cara melakukan penjabaran dan penyesuaian Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan.

Agar penyusunan KTSP dapat optimal maka perlu dilakukan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan kepada tenaga daerah agar dapat melaksanakan tuntutan Permendiknas yang ada. Usaha tersebut adalah melakukan pembinaan untuk mengembangkan kemampuan profesional guru dan para pelaksana lainnya. Peningkatan keterampilan profesionalisme tersebut mencakup hal-hal yaitu:

- kemampuan dalam mengajar
- penguasaan materi yang memadai
- kemampuan dalam menyiapkan perangkat untuk melaksanakan tugas sehari-hari
- meningkatkan pemahaman terhadap pengetahuan-pengetahuan baru dalam bidang pendidikan

2. PENGEMBANG KURIKULUM

Peningkatan mutu dalam bidang pendidikan khususnya untuk pendidikan dasar tidak lepas dari peran guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk selalu meningkatkan kemampuan dirinya. Sesuai dengan tuntutan peraturan Menteri Nomor 19 yang menuntut guru/sekolah untuk dapat mengembangkan kurikulum

sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya tenaga yang kompeten dalam mengembangkan kurikulum tersebut. Dengan adanya tenaga itu diharapkan akan dapat membantu guru/sekolah dalam menyusun KTSP. Oleh karena itu, perlu ada pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Agar tenaga yang dipilih dapat sesuai maka ditentukan terlebih dahulu kriteria dalam menentukan calon pengembang kurikulum.

Kriteria tenaga daerah/calon pengembang Kurikulum itu antara lain:

- Memiliki kompetensi untuk menjadi pelatih
- Memiliki motivasi untuk maju
- Memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan
- Bagi guru: berlatar belakang pendidikan mata pelajaran (contoh: IPS, IPA, Matematika, Bahasa Indonesia)
- Sebaiknya berusia di bawah 50 tahun atau maksimum 50 tahun atau yang kondisi kesehatannya baik
- Peserta berasal dari sekolah yang berbeda

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan Pengembangan Profesionalisme Pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota antara lain:

Melalui kegiatan ini diharapkan menghasilkan antara lain:

1. Sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada satuan pendidikan, serta mampu melaksanakan monitoring pada PAUD formal dan non formal di daerahnya
2. Dihasilkannya contoh-contoh Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Kejuruan, Pendidikan Luar Biasa, dan PAUD Formal dan Non Formal.
3. Untuk mempersiapkan para penentu kebijakan pendidikan dan pengelola/pelaksana kependidikan di daerah agar mampu melanjutkan pengembangan profesionalisme di daerahnya sendiri.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan antara lain:

1. TPK di 33 kabupaten/kota dari 33 provinsi pada satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Kejuruan, dan Pendidikan Luar Biasa
2. TPK di 17 kabupaten/kota dari 33 provinsi pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal.
3. Materi pelatihan mencakup materi umum kebijakan penyusunan dan pelaksanaan KTSP (Kebijakan Pengembangan Kurikulum, Konsep Dasar KBK, KTSP, Silabus dan RPP, Model-model Kurikulum, Kegiatan Pengembangan Diri, Program Muatan Lokal, pembelajaran Tematik kelas awal SD, Pembelajaran terpadu IPA & IPS SMP/MTs, Penilaian kelas, Kebijakan Kurikulum PAUD formal dan non formal, Karakteristik Layanan PAUD, Pembelajaran PAUD, SKM dan SKH PAUD formal dan non formal, dan Penilaian PAUD

D. STRATEGI PELAKSANAAN (Tahapan dan metode kegiatan, unsur yang terlibat)

Sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan di tiap kabupaten/kota, dilakukan rapat koordinasi antara petugas pusat dan petugas dari Dinas pendidikan kab/kota tentang teknik dan strategi pelaksanaan di daerah. Selain itu juga penetapan kriteria Tim

Pengembang Kurikulum Kab/kota. Hal tersebut agar pelaksanaan kegiatan di daerah dapat dilakukan secara maksimal.

Kegiatan di daerah dilaksanakan melalui berbagai macam strategi, mencakup

- Pre-test
- Paparan materi
- Diskusi dan tanya jawab
- Workshop Pengembangan KTSP
- Presentasi Hasil Workshop
- Penyusunan Action Plan
- Post-test

Unsur yang terlibat dalam kegiatan Pengembangan profesionalisme TPK kab./kota antara lain:

a. Peserta Kegiatan dari PAUD

Kegiatan	Unsur	Personal *)	Jumlah orang	ket
PAUD	Dinas	Kasubdin yang menangani PAUD	1	Dari sekolah yang berbeda
		Kasi yang menangani PAUD PAUD	1	
	KB/TPA/TK/RA	Kepala Kelompok bermain	2	
		Kepala Taman Penitipan Anak	2	
		Kepala TK	2	
		Kepala RA	2	
	PANITIA		2	
JUMLAH PESERTA PAUD			12	

b. Peserta Kegiatan dari Pendidikan Dasar

Kegiatan	Unsur	Personal *)	Jumlah orang	ket
DIKDAS	DINAS	Kepala Dinas	1	Dari sekolah yang berbeda
		Kasubdin yang menangani SD	1	
		Kasi yang menangani Kurikulum SD	1	
		Kasubdin yang menangani SMP	1	
		Kasi yang menangani kurikulum SMP	1	
	SD	Kepala Sekolah SD	1	
		Guru kelas I	1	
		Guru kelas IV	1	
		Guru Penjas	1	
		Guru Agama	1	
	SMP	Kepala SMP	1	
		Guru Matematika	1	
		Guru IPA	1	
		Guru PKn	1	
		Guru B. Indonesia	1	
		Guru IPS	1	
		Guru B. Inggris	1	

MI **)	Kepala MI	1	
	Guru MI	1	
MTs **)	Kepala MTs	1	
	Guru MTs	1	
SDLB**)	Kepala SDLB	1	
	Guru SDLB	1	
SMPLB* *)	Kepala SMPLB	1	
	Guru SMPLB	1	
Pengawa s	SD	1	
	SMP	1	
Panitia		3	
JUMLAH PESERTA DIKDAS		30	

c. Peserta dari Pendidikan Menengah

Kegiatan	Unsur	Personal *)	Jumlah orang	total	
DIKMEN	Dinas	Kasubdin Dikmen	1		
		Kasikur Dikmen	1		
	SMA	Kepala SMA	1		
		Wakil Kepala Sekolah	1		
		Guru IPA	1		
		Guru IPS	1		
		Guru Matematika	1		
		Guru B. Indonesia	1		
		Guru B. Inggris	1		
		Guru Ekonomi	1		
		Guru BP	1		
		Guru Muatan Lokal	1		
		Pengawas SMA	1		
		MA	Kepala MA		1
			Guru Agama		1
	Guru BI		1		
	Guru matematika		1		
	Guru B. Inggris		1		
	SMALB **)	KS SMA LB	1		
		Guru LB	1		
		Guru LB	1		
		Guru LB	1		
	SMK	Kepala SMK	1		
		Wakil kepala SMK	1		
		Guru kelompok Normatif	1		
		Guru kelompok Adaptif	1		
		Guru Kelompok Produktif	1		
		Pengawas SMK	1		
	Panitia		2		
	JUMLAH PESERTA DIKMEN		30		

BAB II. HASIL KEGIATAN

A. TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)

Kondisi Tim Pengembang Kurikulum Kab/kota dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain:

1. Tingkat Pemahaman terhadap kebijakan pengembangan KTSP

Tingkat pemahaman TPK terhadap kebijakan KTSP dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

- a. TPK yang tingkat pemahamannya masih belum memadai dan masih dalam taraf sosialisasi yaitu Kab. Konawe, Kab. Boalemo, Kab. Natuna, Kab. Merauke, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Sorong Selatan, Kab. Klungkung, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Aceh Utara, Kab. Rejang Lebong, Kab. Pandeglang, Kab. Sambas, Kab. Barito Kuala, Kab. Polewali, dan Kab. Sikka,
- b. TPK yang memiliki kemampuan sedang dan perlu dimantapkan, antara lain Kab. Muaro Jambi, Kab. Pangkep, Kab. Pacitan, Kab. Bitung, Kab. Purworejo, Kab. Bantul, Purworejo, Kota Metro, Kab. Belitung, Kab. Tasikmalaya, Kab. Administratif Kepulauan Seribu, Kab. Toli-toli, Kab. Lombok Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Maluku Tengah, dan Kab. Tidore, dan
- c. TPK yang memiliki kemampuan yang sudah memadai, antara lain Kota Dumai, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Bukit Tinggi.

2. Legalitas TPK

Berdasarkan Surat Edaran Menteri No. 33 Tahun 2006 Tim Pengembang Kurikulum kabupaten/kota dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota. Berdasarkan terbentuknya TPK dan ada tidaknya SK, maka keberadaan TPK kabupaten/kota dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Kabupaten/kota yang belum membentuk TPK, yaitu Kab. Sorong Selatan, Kab. Pangkep, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Sambas, Kab. Kepulauan Seribu, Kab. Natuna, dan Kab. Rejang Lebong.
- b. Kabupaten/kota yang sudah memiliki TPK dengan SK dari Dinas Pendidikan Setempat, antara lain: Kab. Aceh Utara, Kab. Tebing Tinggi, Kab. Muaro Jambi, Kab. Pacitan, kab. Sikka, kab. Belitung, Kab. Tasik Malaya, Kota Tebing Tinggi, Kota Metro, Kab. Rejang Lebong, Kota Bukit Tinggi, Kab. Toli-toli, Kab. Bitung, Kab Boalemo, Kab. Purworejo, Kab. Barito Kuala, Kab. Kutai Timur, Kota Dumai, Kab. Maluku Tengah, Kab. Pandeglang, kab. Polewali Kab. Konawe Kota Tidore, Kab. Lomok Timur, kab. Merauke, Kab Kepulauan Seribu, Kab. Sorong Selatan, dan Kab. Sambas.
- c. Kabupaten/kota yang telah memiliki TPK dengan SK Bupati yaitu Kab. Bantul.

3. Program TPK

Program kerja TPK dalam pengembangan KTSP yang telah terdata, antara lain dari Kab. Natuna, Kab. Merauke, Kab. Sorong Selatan, Kab. Bitung, Kab. Pandeglang, Kab. Pangkep, kab. Kepulauan Seribu, Kota Tebing Tinggi, Kab. Bantul, Kab. Sambas, Kab. Lombok Timur, dan Kota Dumai.

PAUD formal dan non formal keterlibatannya dalam TPK baru pada tahun 2007 ini, sehingga program kerja PAUD di TPK baru dibuat tahun ini. Sebelumnya PAUD lebih banyak beraktivitas di KKG, IGTK dan HIMPAUDI.

B. KEMAMPUAN TPK DALAM MENYUSUN DOKUMEN KTSP

Dalam pelatihan TPK seluruh peserta di seluruh kabupaten/kota menunjukkan keseriusan dan antusiasme yang sangat tinggi. Rasa ingin tahu dan ingin maju yang sangat tinggi menunjukkan motivasi mereka dalam memahami dan ingin melaksanakan kebijakan kurikulum baru secara maksimal. Sehubungan dengan tugas TPK untuk mendampingi satuan pendidikan di wilayahnya dalam rangka mengembangkan KTSP, memverifikasi KTSP yang telah disusun oleh satuan pendidikan, dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KTSP.

Berdasarkan hasil workshop diperoleh informasi bahwa kemampuan TPK masih bervariasi dalam mengembangkan KTSP. Sebagian besar mereka masih mengadopsi dari contoh model yang telah disediakan. Dari yang mengadopsi tersebut, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa daerah yang pemahaman TPK dalam mengembangkan KTSP masih sangat sederhana. TPK masih dalam taraf memahami kebijakan tahap awal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya informasi yang diberikan baik dari tingkat pusat maupun dari provinsi dan dinas setempat. Bahkan terdapat daerah yang belum pernah memperoleh sosialisasi KTSP sehingga pada saat workshop pedoman yang digunakan dalam pengembangan KTSP yaitu kurikulum 2004 (KBK) bukan SI dan SKL.

Selain itu, terdapat daerah yang memahamai KTSP hanya pada bagian dokumen II yaitu silabus dan RPP. Mereka belum memahami bahwa KTSP terdiri dari Dokumen I dan II, sehingga masih perlu dibimbing untuk menyusun dokumen I. Bagi daerah yang TPK telah mampu mengembangkan KTSP dengan baik tetap memerlukan pembinaan dan bimbingan secara terus menerus agar kemampuan mereka menjadi lebih memadai untuk mendampingi sekolah dalam menyusun KTSP.

Pada PAUD formal menggunakan kurikulum TK 2004, sedangkan PAUD non formal sebagian daerah kabupaten/kota menggunakan kurikulum TK 2004 dengan kompetensi yang disesuaikan dengan usia perkembangan anak (60%) dan sebagian daerah kabupaten/kota menggunakan menu generik (40%). Umumnya PAUD formal sudah memahami cara membuat SKM/SKH dengan tematik dan proses penilaiannya. Namun, PAUD non formal hanya sebagian saja yang memahami dengan baik cara membuat SKM/SKH dengan tematik dan proses penilaiannya. Hal ini disebabkan kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi pengelola dan guru PAUD non formal masih sangat kurang. Pada umumnya pengelola dan guru PAUD formal belajar dalam merencanakan pembelajaran/kurikulum dengan inisiatif sendiri yaitu dengan cara bertanya pada guru PAUD formal atau belajar mandiri. Mengenai KTSP, pada PAUD formal dan non formal belumlah diterapkan oleh pemerintah. Namun, mereka diperkenalkan tentang KTSP yang kemungkinan nantinya juga akan menerapkan kurikulum sekolah sendiri.

C. HASIL WORKSHOP

Dari hasil workshop diperoleh gambaran bahwa para peserta masih belum secara maksimal dapat mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang diharapkan, antara lain:

- Sebagian besar peserta mengalami kesulitan dalam memilih mata pelajaran muatan lokal dan menentukan SK dan KD yang sesuai dengan mata pelajaran yang dipilihnya.
- Terdapat beberapa daerah yang telah memilih muatan lokal dan sudah dilaksanakan dengan buku ajar yang ada (misalnya Bahasa Jawa, Bahasa Sunda, Arab Melayu) tetapi tidak membuat SK dan KD sesuai dengan muatan lokal yang dipilihnya.
- Konsep pengembangan Life skill belum dipahami sehingga dalam contoh pembelajaran yang dikembangkan life skill belum terintegrasikan dalam kegiatan yang dikembangkan
- Masih ada daerah yang belum menyusun model atau contoh program pengembangan diri.
- Hampir semua guru SD mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran tematik.
- Hampir semua guru SMP mengalami kebingungan dan kesulitan dalam menyusun dan mengembangkan pembelajaran IPA dan IPS terpadu.
- Pendidikan Luar Biasa standar isi untuk program C, C1, D1, G belum ada, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menyusun KTSP, silabus, dan RPP.
- Selama ini pelatihan untuk PAUD formal secara rutin diperuntukan bagi TK Pembina. TK swasta dan PAUD non formal sangat jarang memperoleh pelatihan dan pembinaan dari dinas Pendidikan atau Pemda setempat, sehingga PAUD non formal masih belum lancar dalam menyusun SKM & SKH serta dalam melaksanakan proses penilaian
- Pada umumnya, peserta kegiatan monitoring ini telah mengikuti Workshop Pengembangan Profesional beberapa waktu lalu. Walaupun begitu, beberapa permasalahan yang cukup krusial masih tampak. Antara lain dalam hal pengertian atau konsep mengenai PAUD masih cenderung membedakannya dengan TK. PAUD dianggap sebagai program kegiatan di luar TK, seperti kelompok belajar.
- Masih tingginya rasio guru-siswa di TK dan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai.
- Ketidaksiapan para peserta dalam menyajikan pembahasan dalam microteaching, menguatkan dugaan adanya kelemahan dalam penguasaan konsep dan penerapannya dalam program PAUD.

D. PERSOALAN, KENDALA, DAN HAL LAIN YANG DIHADAPI

Kebijakan pengembangan KTSP bukan merupakan kebijakan yang secara keseluruhan adalah hal baru. Esensi dari KTSP merupakan kelanjutan dari kebijakan kurikulum sebelumnya dimana filosofi pengembangan KTSP yaitu berbasis kompetensi seperti yang diamanatkan dalam UU SPN No.20/2005 yang telah mulai dikembangkan dan disosialisasikan sejak tahun 2001. Namun demikian, masih ditemukan persoalan dan kendala dalam memahami dan melaksanakan kebijakan tersebut.

Persoalan dan kendala tersebut mencakup antara lain:

- Tingkat pemahaman kebijakan KTSP belum memadai karena kendala akses informasi. Walaupun dinas sudah mengalokasikan dana tapi masih perlu kegiatan yang lebih intensif lagi.
- Letak sekolah ada yang sangat jauh (3 jam perjalanan darat) dan di pulau menyebabkan jika ada undangan ke dinas kadang-kadang sulit menghadirkan mereka
- Kurangnya fasilitas buku ajar.
- Sarana dan prasarana sekolah
- Konsep life skil belum difahami sehingga belum terintegrasi dengan baik dalam pembelajaran
- pemahaman KTSP DI SMK belum maksimal sehingga dokumen-dokumen yang dihasilkan masih belum memadai
- Kemampuan peserta untuk mengembangkan KTSP belum memadai
- Sudah sering menerima informasi tentang KTSP tetapi masih kurang memadai hasilnya.
- Sosialisasi kurang meskipun pengawas sudah pernah mengikuti penataran
- Tidak ada dukungan dana
- Buku SMK sangat kurang. Terutama buku program produktif. Sekolah tidak mampu menyusun dan tidak ada yang menerbitkannya.
- Pengetahuan kurang, motivasi dan etos kerja rendah
- Kontribusi komite sekolah berkaitan dengan penyusunan dan pengembangan KTSP masih kurang.
- Tim pengembang kurikulum tidak dipilih secara obyektif dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan sehingga pada saat pelatihan berjalan kurang maksimal
- SMK masih memerlukan pembinaan dari direktorat kejuruan karena belum memiliki kompetensi bidang keahlian
- Kemampuan peserta belum merata dan belum mantap sehingga masih perlu pelatihan
- Terdapat pertanyaan mengapa di kejuruan ada IPA dan juga ada biologi, fisika, dan kimia
- Tenaga Guru di daerah pinggir sangat terbatas
- Belum tahu cara menentukan KKM, terutama bagi peserta dari SD
- Sarana Pembelajaran kurang memadai, kurang adanya kreativitas dari guru untuk mengembangkan sarana dan prasarana sendiri secara sederhana dengan bahan yang murah yang dapat diperoleh di sekitarnya
- Belum tahu cara merumuskan Indikator
- Kurangnya SDM Guru untuk mata pelajaran olahraga
- Kesulitan membuat SK dan KD muatan lokal, dukungan dari dinas pendidikan dalam menyusun SK dan KD mulok kurang maksimal
- mata pelajaran IPS di SMK dipertanyakan keberadaannya
- Sosialisasi dari Depag untuk Madrasah dirasakan kurang memadai
- Pengembangan diri sulit dipahami bahasa psikologinya sehingga perlu dilengkapi glosari atau sejenis penjelasan yang lain agar mudah dipahami guru.
- Kondisi geografis yang berjauhan menyulitkan sosialisasi
- Rendahnya pendapatan perkapita menyebabkan sekolah sulit menambah biaya operasional yang dikumpulkan dari orang tua
- Letak geografis yang jauh dari kabupaten lain dan berbatasan dengan laut menyebabkan akses informasi yang tidak mudah

- Akses transportasi dari daerah lain kadang masih sulit.
- Walaupun termasuk ke dalam wilayah DKI, tetapi kondisi geografis (kondisi alam yang tidak menentu misalnya musim ombak, angin) mempengaruhi transportasi dan menyebabkan terganggunya proses KBM dan kegiatan guru-guru di dinas
- Masih dalam taraf pemahaman, tetapi belum sampai menyusun, sehingga ketika dari Puskur menuntut untuk mampu menyusun KTSP, mereka mengalami kesulitan
- Walaupun sudah sering menerima sosialisasi, praktek tidak pernah dilakukan
- Motivasi yang dimiliki peserta untuk meningkatkan kemampuan rendah sehingga harapan untuk dapat menularkan ke sekolah-sekolah lain juga kecil
- Komite sekolah kurang mendapatkan informasi tentang KTSP sehingga keterlibatannya tidak maksimal
- Sosialisasi baru dari PUSKUR sehingga sangat kurang.
- Dinas pendidikan kabupaten belum memiliki anggaran dalam persiapan pelaksanaan KTSP.
- Untuk kelompok SMK belum tersedianya guru mata diklat seni budaya, bahasa asing dan TIK
- Kurangnya koordinasi antara pengelola PAUD non formal (KB) dengan Dinas Pendidikan karena belum jelasnya secara struktur pembinaan di Dinas terhadap PAUD non formal.
- Kurangnya pemahaman pengawas/penilik PLS tentang Kebijakan PAUD, Program Kegiatan Belajar, Penilaian di PAUD.
- Masih ada pengawas/penilik PLS di beberapa daerah kabupaten/kota yang belum memahami tugas sebagai pembina PAUD non formal.
- Untuk keperluan media atau alat peraga pembelajaran pada PAUD non formal pada umumnya membuat sendiri sedangkan pada PAUD non formal membeli buatan pabrik dan membuat sendiri.

Hal lain dalam pelaksanaan pelatihan:

- Motivasi yang sangat tinggi menjadi modal mereka untuk maju. Akan tetapi karena posisi geografis dan sulitnya akses informasi menjadikan daerah kurang maju
- Daya dukung masyarakat untuk memajukan pendidikan rendah, misalnya siswa dilarang masuk sekolah oleh orang tua untuk membantu melaut
- Pendapatan perkapita rendah karena sebagian besar nelayan dan alam sudah kurang mendukung karena polusi
- Pendidikan para nelayan rendah sehingga kurang mendukung kebijakan sekolah.
- Perlu adanya persamaan persepsi antara staf dinas, pengawas, kepala sekolah dan guru dalam pemahaman tentang KTSP
- Daerah terlalu luas sehingga jarak tempuhnya memakan waktu yang lama serta transportasi kurang memadai
- Keadaan geografis yang menyebabkan keterbatasan untuk mendapatkan informasi dengan cepat
- Masih dalam situasi pasca gempa sehingga sarana dan parasarana masih minim dan masih trauma
- Kondisi geografis. Terdapat bagian dari Kabupaten yang letaknya sangat jauh sehingga untuk mencapai kabupaten perlu transportasi yang besarnya mencapai Rp 2 juta satu kali jalan
- Anggaran pendidikan dari APBD sudah cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain

- Meskipun secara geografis cukup terpencil, tetapi akses transportasi dan informasi cukup memadai
- Kurangnya motivasi peserta dapat menyebabkan terhambatnya pendidikan di kabupaten natuna. Hal tersebut terlihat dari kurang aktifnya peserta baik untuk bertanya dan untuk mencatat bahan pelatihan.
- Semangat dan motivasi guru/tutor PAUD formal dan non formal sangat besar dalam mengajar dan meningkatkan pengetahuan secara mandiri, walau kesejahteraan honor dan perhatian dari Dinas Pendidikan atau Pemda setempat masih minim.
- Bantuan pembinaan pengembangan profesional yang diperlukan oleh pengelola/pelaksana kependidikan di daerah untuk memajukan/memperbaiki PAUD formal/non formal yang diharapkan yaitu: pembinaan profesional yang berkaitan dengan kurikulum dan pembinaan yang sifatnya berkesinambungan

E. DAFTAR PERTANYAAN YANG SERING MUNCUL DALAM KEGIATAN PELATIHAN

- Terdapat Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Apakah dimasukkan ke dalam semua mata pelajaran?
- KKM sekolah menuju ke kriteria ideal 7,5. Sekolah kami hanya 6, apa diperbolehkan?
- Bagaimana jika seorang anak pindah ke sekolah lain yang KKM-nya 8, padahal sekolah kami di bawah 8?
- Bagaimana dengan penambahan 4 jam pelajaran? Apa itu berlaku juga untuk SD?
- Bagaimana mengaitkan Visi, Misi, dan Tujuan dalam dokumen KTSP ?
- Apa persamaan dan perbedaan KBK dan KTSP?
- Apakah SK dan KD tidak boleh berubah?
- SK dan KD tidak boleh berubah, indikator dikembangkan sekolah, dan bagaimana dengan UAN nya?
- Apa bisa 1 orang guru mengajar semua mata pelajaran di IPA/IPS ?
- Apa pembuatan RPP itu 1 SK dan 1 KD saja ?
- Bagaimana mengisi raport untuk pengembangan diri ?
- Apakah KTSP itu harus lengkap semua silabus dan rpp semua mata pelajaran?
- Sampai kapan berlakunya KTSP ?
- Apakah pembelajaran tematik harus mengaitkan semua mata pelajaran?
- Apakah SDLB semua pembelajarannya tematik?
- Dalam dokumen 1 KTSP, ada visi, misi, tujuan sekolah. Apa boleh ditambah dengan indikator?
- Dalam panduan yg dibuat direktorat dikmen, nonakademis digunakan untuk menetapkan KKM, apa maksudnya?
- Apa boleh dokumen 1 KTSP yg disahkan tanpa dokumen 2?
- Bagaimana pembelajaran IPA terpadu, karena dalam 1 semester hanya ada biologi atau fisika saja?
- Bagaimana strategi mengajar IPA/IPS terpadu di SMP?
- Dalam jadwal pelajaran kelas 1 sampai 3, apakah ditulis tematik saja atau mata pembelajarannya?
- Dalam RPP, apakah SK, KD dan indikator ditulis lagi?
- Bagaimana mengenai rapor untuk 2007/2008?

- Apakah puskur membuat program produktif untuk SMK?
- Apakah IPS terpadu, sedangkan dalam SI masih terkotak-kotak ada mata pelajaran sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah?
- Berapakah perbandingan yg ideal untuk seorang konselor dalam menangani peserta didik? Apakah 1:80 sesuai panduan direktorat dikmen?
- Menurut saya, pemerintah terlalu mudah untuk melakukan perubahan terhadap kurikulum. Menurut saya, kurikulum yang ada sebetulnya tidak bermasalah yang signifikan tetapi diubah menjadi kurikulum yang sekarang dinamakan KTSP. Apakah pemerintah mempunyai data yang akurat yang menyebabkan kurikulum yang sudah ada ini harus diubah menjadi ktsp?
- Dulu kita pernah menggunakan kurikulum KBK, lalu kurikulum 2004. sekarang belum lagi 10 tahun kurikulum sudah diubah menjadi kurikulum ktsp. Sebenarnya bagaimana sih? Apakah kurikulum 2004 atau kurikulum KBK itu sudah dianggap gagal?
- Kami di sekolah rasanya seperti kelinci percobaannya orang pusat. Ketika orang pusat yang sangat ahli memperoleh ilmu baru, kita buru-buru langsung menanggapi dan melakukan perombakan. Nanti pembaharuan yang satu belum lagi dilaksanakan dengan sempurna ada lagi perintah menjalankan sesuatu yang baru. Terus kapan pendidikan yang sedang berlangsung di sekolah kami bisa aman dari gangguan pembaharuan itu?
- Pada silabus ada indicator yang harus dibuat sendiri oleh kami. Pada kurikulum KBK sudah ada indicator. Sebenarnya yang enak adalah KBK karena kami tidak perlu menyusun indicator lagi. Apakah kami diperbolehkan menggunakan kurikulum KBK untuk mengambil indikatornya?
- Menurut saya mulok adalah meningkatkan potensi yang ada di daerah bukan mata pelajaran yang sifatnya internasional seperti bahasa inggris. Tetapi di beberapa daerah dan beberapa sekolah ada yang muloknya adalah bahasa inggris dan computer. Ini bagaimana? Dimana muloknya?
- Berapa banyakkah mulok yang diperbolehkan dilaksanakan di sekolah?
- Apakah setiap siswa harus mengikuti mulok yang sama?
- Mengapa mulok harus ada silabusnya yang juga memuat SK dan KD? Mengapa penyusunan SK dan KD nya dibebankan kepada sekolah?
- Di sekolah kami saat ini tetap melaksanakan mata pelajaran keterampilan elektronika. Apakah ini bisa kami gunakan sebagai mulok di sekolah kami? Apa saran Ibu?
- Pada SK dan KD standar isi pada mata pelajaran IPA, terlihat ada satu semester isinya hanya biologi saja atau fisika saja? Bagaimana pelaksanaannya di kelas? Bagaimana caranya untuk membuat IPA terpadunya?
- Apakah pada penyusunan IPA terpadu diperbolehkan berbeda semesternya? Karena kalau hanya satu semester saja hanya berisi salah satu mata pelajaran seperti fisika saja.
- Pada penentuan tema-tema untuk tematik, apakah kita hanya menggunakan acuan yang telah ada atau boleh menetapkan sendiri?
- Bagaimana mengkaitkan tema-tema yang telah ada dalam bentuk silabus dan rpp? Apakah kalau melihat contoh yang ada khususnya pada rpp-nya seolah-olah dalam satu hari siswa akan mengikuti lima mata pelajaran, padahal pada jadwal yang juga ada pada contoh kelas satu satu harinya hanya 3 mata pelajaran? Bila satu hari siswa mengikuti lima mata pelajaran berarti sama dengan anak smp atau sma,

belum lagi beban buku yang harus dibawa siswa ke sekolah, apakah ini tidak mengganggu kesehatan anak?

- Penilaian yang sekarang kan ada bermacam-macam, seperti ada performans, ada produk, ada portofolio dan sebagainya. Padahal kita semua tahu bahwa ujian yang sifatnya nasional nantinya hanya bersifat pilihan ganda saja. Lalu apa gunanya kita melakukan penilaian seperti itu semuanya?
- Mata pelajaran apa saja yang ada penilaian produknya? Kalau kita akan melakukan penilaian produk, apa saja yang harus kami siapkan? Apakah setiap satu KD harus ada penilaian produknya?
- Apakah benar bahwa penilaian proyek itu mencakup berbagai mata pelajaran?
- Menurut Guru agama :” Mampu mengartikan ayat aluran, kan tidak mungkin karena berbagai latar belakang”. Menurut peserta Saran mengartikan ayat Al Quran Kegiatan guru lebih menonjol, gimana? Gimana memberi nilai? Kapan 1,2 . Bobot tidak jelas, gimana?
- Skor dan bobot, mana yang paling tepat menentukan skor atau bobot? Skor dan bobot menjadi masalah. (Guru tidak bisa membedakan antara skor dan bobot). Permasalahan ini dijawab oleh peserta lainnya dan diperjelas oleh tim Puskur.
- Gimana dengan sekolah lain yang tidak memiliki LCD, apa alternatifnya.
- Belum ada tujuan pada satuan pendidikan , kalau bisa ditambahkan.
- Permasalahan yang sering muncul dalam pelatihan /bimbingan profesional ialah pada Penilaian, seperti mengapa penilaian masih saja dilakukan di tingkat nasional dan tidak pada tingkat satuan pendidikan? Pertanyaan ini juga diikuti dengan mengapa kok hanya tiga matapelajaran itu saja dan mengapa tidak semuanya saja? Pertanyaan tentang penilaian juga menyangkut tentang pembuatan skor, membuat pembobotan, dan menentukan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), Peserta pada sekolah paling baikpun tidak dapat membedakan antara skor dan bobot, hubungan apa yang terjadi antara skor dan bobot. Pada beberapa sekolah telah melaksanakan KTSP dengan segala keterbatasannya. Masih dalam penilaian , di hampir banyak peserta yang mengikuti pelatihan ini nampaknya sering terhenti dalam menjabarkan indikator yang ada, padahal indikator itu sendiri masih dapat diuraikan lebih rinci dan lebih terukur lagi, seperti pemahaman identifikasi, diskusi, pemaknaan diskusi dan identifikasi dan terminologi lainnya sering berhenti sampai disitu, sehingga pemahaman diskusi maupun identifikasi dipahami secara beragam oleh para peserta.
- Pada sekolah kejuruan ada pemahaman berbeda dengan sekolah umum lainnya, khususnya dalam memahami indikator dan materi, bahkan ada pembiasaan pemahaman pada penjabaran dari Kompetensi dasar pada standar isi ke indikator, beberapa peserta menjabarkannya persis seperti apa yang dicontohkan oleh tabel silabus pada contoh KTSP buatan BSNP, ada yang menjabarkannya dalam bentuk materi.
- Para peserta juga menanyakan apa gunanya dan bagaimana menyusun tujuan pembelajaran dalam RPP, untuk itu dibahas secara bergantian dari peserta ke peserta lainnya memberikan pendapatnya. Seperti tujuan merupakan jalur yang menjadi konsentrasi /fokus guru dalam membelajarkan anak dalam satu event pertemuan. Dicontohkan kepada SMK seperti tujuan pembelajaran listrik yang mempunyai banyak sub topik seperti seri, paralel, elemen, kapasitor, jika dibuat RPP untuk rangkaian seri sendiri maka judulnya dapat ”Rangkaian Seri” tetapi akan berbeda ketika dalam satu RPP hendak diberikan 2, 3 topik bersama , judul yang diberikan juga tentu akan berbeda, dan itu sangat tergantung dari minat

guru, rencana gurunya sesuai dengan teknik, metoda yang disenangi dan dikuasai oleh guru yang bersangkutan.

- SMK ada 128 program, pertanian belum ada SK dan KD nya ?
- Apa Puskur menyediakan program pertanian dan program produktif ?
- Mengapa SKBM sekarang menjadi KKM ?
- Bagaimana mengaitkan Visi, Misi, dan Tujuan dalam dokumen KTSP ?
- Apa persamaan dan perbedaan KBK dan KTSP ?
- SKBM kriterianya ada esensial, mengapa KKM tidak ada kriteria esensial ?
- Bagaimana mengisi raport untuk pengembangan diri ?
- Bagaimana penilaian potofolio ?
- Apakah kegiatan eksperimen dalam IPA dapat dilihat sebagai penilaian performance dan proyek ?
- Karya tulis dan menyusun teks pidato bisa dimasukkan dalam portofolio ?
- Bagaimana dengan pembelajaran IPA Terpadu karena dalam 1 semester hanya biologi ?
- Apakah SDLB semua pembelajarannya tematik ?
- Bagaimana keterkaitan kuri 94 – 2004 dan KTSP
- di Lap. masih banyak tenaga / guru yang kurang berkualitas, bagaimana pusat dapat menjangkau semuanya?
- Mengapa harus ada sertifikasi guru ?
- Di KTSP , RPP merupakan salah satu perangkatnya, tetapi BSNP, RPP tidak termasuk perangkat. Bagaimana ?
- Pengembangan pelaksanaan kurikulum ada beberapa kriteria yang : potensi daerah, kebutuhan daerah, Iptek dll. Bagaimana daerah yang hanya mengembangkan beberapa kriteria tersebut dapat menyelesaikan soal UN / ENTANAS ?
- Apa beda pengembangan diri akademik dan non akademik ?
- Sampai dimana pengembangan diri memberi kontribusi dalam kenaikan kelas?
- Bila dalam suatu kelas heterogen / memiliki kemampuan yang berbeda, bagaimana mengatasinya ?
- Siswa yang memiliki kemampuan yg menonjol di satu bidang, kurang dihargai oleh bidang lain, bagaimana mengatasinya & bisakah ini dijadikan action research ?
- Bagaimana bila RPP tidak sesuai dengan pelaksanaannya.
- Bila SDM kurang bagaimana solusinya ?
- Bagaimana menilai dari tema tersebut untuk memasukkan ke MP-2 yang terkait?
- Dalam simulasi, demonstrasi, sosiodrama , dll, apakah bisa dengan unjuk kerja ?
- Bagaimana hubungan antara penilaian sikap dengan penilaian diri / pribadi.
- Apakah visi-misi dalam KTSP yang disusun oleh masing-masing sekolah boleh menggunakan bahasa anak supaya memiliki keterbacaan yang tinggi?
- Bagaimana bila visi-misi menggunakan bahasa daerah, karena KTSP kan dibuat langsung oleh sekolah dan digunakan oleh sekolah? Selain itu, penggunaan beberapa bahasa daerah tolitoli (beberapa istilah) bisa membuat terasa lebih akrab dan bisa mempertahankan bahasa daerah).
- Kami sering dibuat bingung oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kami baru saja Sian-siap untuk mempersiapkan diri menggunakan KBK (kur 2004) dan baru mulai membuat silabusnya, Namur sekarang muncul KTSP, ini bagaimana? Apakah in namanya bukan membuat lapangan bertambah bingung? Sebaikny apemerintah jangan asal saja membuat peraturan atau keputusan-keputusan,

sebaiknya pemerintah memperhitungkan betapa bingungnya orang lapangan, apalagi kami di Tolitoli yang mungkin tidak tersentuh oleh Pusat karena lokasinya yang terlalu jauh. Sedangkan penataran KTSP saja orang pusat atau propinsi tidak mau menyentuh daerah kami. Tolong ini diperhatikan.

- Apabila sekolah sudah menghasilkan KTSP, dan kebetulan Kepala sekolahnya dimutasi. Apakah dalam hal ini dapat diartikan bahwa sekolah itu harus menyusun KTSP baru ?, karena tadi ibu sampaikan bahwa visi-misi ditetapkan oleh kepala sekolah melalui rapat dengan dewan guru dan komite sekolah.
- Pada suatu penataran katanya pernah ditetapkan bahwa yang mensahkan KTSP Sekolah Dasar itu Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Apakah memang begitu?
- Dalam menyusun tema, kami bingung dalam mengadmitsitrasikannya. Apakah melalui penataran ini ibu bisa membantu kami membuatkan seluruh tema agar kami menjadi mudah dalam menyusun perencanaannya.
- Bila sudah ada tematik, apakah jadwal pelajaran kelas I, II, dan III bisa berbeda dengan kelas IV, V dan VI? Karena selama ini di sekolah kami jadwal pelajaran ditetapkan sama untuk seluruh kelas dalam seminggunya.
- Kesulitan kami dalam pembelajaran tematik adalah ketika anak bertanya 'Ibu sekarang pelajaran apa?' bagaimana cara saya menjawabnya?
- Bagaimana bila saat penyusunan KTSP, komite sekolah tidak hadir? Apakah visi-misi dapat dikatakan tetap sah?
- Dalam tematik apakah boleh semua mata pelajaran dituangkan pada jadwal pelajaran selama satu hari? Paling banyak berapa mata pelajarankah yang bisa dibentuk menjadi satu tema? Olehkah tema hanya terdiri atas 2 mata pelajaran saja?
- Di SD Percontohan mengambil Bahasa Inggris sebagai mulok sedangkan untuk pelajaran tidak ada bahasa inggris sebagai mata pelajaran. Apakah dibolehkan semua yang termuat di dalam Standar Kompetensi, Kompetensi dasar dan Standar Kompetensi Lulusan digunakan oleh bahasa inggris di dalam pembelajaran muatan lokal?
- Apakah Bahasa Inggris dapat dianggap sebagai mata pelajaran pokok atau pilihan dan bukan merupakan muatan lokal?
- Bagaimana jika kriteria ketuntasan minimal (KKM) tidak tuntas pada beberapa kompetensi dasar (KD)?
- Pada contoh penilaian di mata pelajaran matematika/IPA, diperoleh nilai 80 untuk pemahaman konsep atau hapalan, sementara keterampilan proses atau bernalar hanya memperoleh nilai 20. Apa siswa tetap lulus dengan nilai 20 dalam bernalar?
- Apa KD yang sudah tuntas perlu diujikan lagi pada ujian semester?
- Bagaimana mengelompokkan siswa sesuai minat dan bakat pada Pengembangan Diri?
- Apa yang dimaksud dengan program kegiatan Pengembangan Diri?
- Bagaimana dengan guru Pengembangan Diri pada bidang olah raga yang ternyata tidak kualified (loyo)?
- Bagaimana dengan 'kecakapan hidup' yang tidak sesuai dengan indikator?
- KTSP dibuat oleh sekolah atau beberapa sekolah. Pelaksanaan terakhir yaitu tahun 2009/2010. Kami akan melaksanakannya di kelas I boleh atau tidak?
- KTSP dilaksanakan di daerah, dengan bahan-bahan yang relevan dengan kondisi daerah. Aka tetapi ujian masih nasional dan soal disusun secara nasional. Bagaimana hal ini dapat dilaksanakan?

- Pada tahun 2008 apakah SD sudah melaksanakan ujian nasional untuk tiga mata pelajaran (IPA, Matematika, dan Bahasa)?
- Bagaimana cara menentukan KKM? Berapa kriteria minimalnya?
- Kabupaten Natuna melaksanakan KTSP pada tahun ajaran 2007/2008. Tetapi perangkatnya belum selesai. Boleh atau tidak?
- Siapa yang menentukan muatan lokal?
- Kurikulumnya KTSP (daerah), ujian nasionalnya bagaimana?
- Kapan KTSP diberlakukan?
- Dapatkah menulis persiapan bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris?
- Bagaimana cara penilaian pada tematik?
- Bagaimana cara mengatasi kekurangan alat peraga, alat praktikum, dan media, misalnya pada pembelajaran kimia yang harus melakukan praktikum?
- Bagaimana cara merumuskan indikator?
- Bagaimana dengan ijazah SD yang hanya satu model padahal di provinsi Jawa Tengah ada yang menggunakan kurikulum 1994, kurikulum 2004, dan KTSP. Karena di ijazahnya tertulis mata pelajaran IPS dan PKn, padahal di kurikulum 2004 tertulis PKPS?
- KTSP berlaku sampai kapan?
- Apa boleh dokumen 1 KTSP yg disahkan tanpa dokumen 2?
- Dalam jadwal pelajaran kelas 1 sampai 3, apakah ditulis tematik saja atau mata pelajarannya?
- Bagaimana mengenai rapor untuk 2007/2008?
- Apakah KTSP untuk SDLB A/B/D/E bisa jadi satu?
- Apakah ada perbedaan antara KTSP untuk SMPLB B yang normal dan yang di bawah rata-rata?
- Bingung – KBK belum selesai kok sudah KTSP? Bagaimana dengan buku yang sesuai untuk KTSP?
- Berkaitan pembelajaran IPS terpadu, apakah seorang guru harus menguasai IPS secara utuh, padahal guru hanya menguasai satu antara Sejarah, Ekonomi, atau Geografi?
- KTSP tidak berlaku di Malaysia, hanya ada PGSLP, tapi pendidikan cukup sukses? Di Malaysia guru berpendapatan tinggi, dan pendidikan sukses?
- Pengembangan diri sebagai bagian dari KTSP, bagaimana pelaksanaannya di sekolah?
- Program tematis dalam buku teks pada umumnya masih terpilah-pilah? Perlu bahan ajar yang lebih komunikatif?
- Mulok (pembibitan jeruk) tidak mendukung wajar 9 tahun jika lulus SD langsung siap kerja? Anak SD kok bisa mengolah pembibitan jeruk karena memegang parang saja tidak bisa? Penekanan pada Mulok nanti lulus SD tidak bisa berhitung?
- Dalam dokumen 1 KTSP, ada visi, misi, tujuan sekolah. Apa boleh ditambah dengan indikator?
- Bagaimana cara menyusun mulok?
- Apa mulok dapat berbeda setiap semester?
- Standar itu apa saja?
- Pengembangan diri itu terdiri dari apa saja?
- Apakah tujuan pembelajaran bisa sama dengan indikator (dalam RPP)?
- Apakah muatan lokal dilakukan boleh secara terus menerus dua semester atau satu semester saja?

- Apakah program SKS merupakan wacana saja atau akan ada beneran?
- Bagaimana dengan kedudukan program akselerasi itu dikaitkan dengan SKS?
- Apakah Visi dan misi dari suatu sekolah dapat berubah ?
- Apakah boleh MGMP menyusun KTSP?
- Beban mengajar, apakah 24 jam perminggu sudah harus diterapkan?
- Pemahaman materi minimal kompetensi kelulusan minimal?
- Langkah apa yang harus ambil setelah menetapkan KKM ternyata kondisinya jauh dibawah Standar?
- Kreteria kenaikan kelas, kelulusan tidak boleh ada nilai merah, kalau kita kihat apakah Sekolah boleh menetapkan kreteria kenaikan dan kelulusan.
- Waktu KBK boleh ada 4 mata pelajaran, kemudian Sekarang ada 3 mata pelajaran
- Persyaratan harus dikomunikasikan pada orang tua (Komite)
- Batasaannya berapa kali sekolah dapat merubah KKM kalau ternyata kemampuan siswa tidak tuntas (masalahnya bisa direvisi)
- Sosialisasi ini sudah berjalan 2 tahun, ditempat kaki dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut sangat terbatas, dan masih sangat kurang sosialisasinya.
- Mohon kami diberikan literatur yang cukup untuk muatan lokal dan pengembangan diri.
- Di tempat kami penilainnya bervariasi, yaitu Ulangan harian/ tugas , Ulangan tengah semester dan ulangan terakhir. Bobot Skoringnya ketiganya adalah sama. Bagaimana dengan hal tersebut. Karena khususnya tugas yang dilakukan di rumah kadang bukan anak sendiri yang melakukan?
- Ketentuan KKM di sekolah kami maksimal ada 4 matapelajaran, disamping itu ada ketentuan lain kalau siswa kehadirannya kurang dari 85%, maka anak tersebut tidak naik. Sebetulnya saya kurang terima dengan pernyataan ini, kalau menurut Ibu bagaimana? Dan apakah KKM-nya bisa direvisi
- Pada saat kita membuat silabus, di sana ada indikator. Kemudian di dalam menyusun soal disitu ada dinyatakan menyusun inidikator. Guru bingung saat menentukan indikator. Indikator mana yang dituangkan. Apakah indikator silabus apa indikator soal
- Mohon perlu dipertegas lagi pada kata operasional khusus atau umum dalam penilaian A,B,C,D (Action. Behavior, Content, dan Degree) atau yang mana ?
- Silabus yang baku seperti apa? Karena sampai saat ini belum ada silabus yang baku.
- Dalam merumuskan Tujuan, apakah harus mengacu pada materi pembelajaran?
- Apakah RPP identik dengan SP pada waktu dulu?
- Penilaian pada raport dulu menilai aspek dalam mata pelajaran kalau yang sekarang seperti apa?
- Apakah dengan KTSP ujian semester ini untuk semua? Pakah boleh dengan sistem blok! Sekolah masih melakukan semester.
- Pembelajaran tematik seperti apa? Dan bagaimana hubungannya dengan penilaian?
- Di Pendidikan Dasar (SD) kalau diberi PR hasilnya selalu baik bagai mana menyikapi seperti ini agar dalam penilaian secara keseluruhan menjadi obyektif.
- mana yang lebih ideal, apakah ulangan/ujian tengah semester atau ulangan/ujian akhir semester.
- Mata pelajaran keterampilan di berikan disatu pendidikan yg lebih rendah atau LB, di SMA sebagai MP Tambahan, bagaimana di sekolah sekalian mata mulok juga ada keterampilan? Bagaimana keduanya diberikan di sekolah?

- Penugasan terstruktur dan mandiri tidak terstruktur. Dalam memberikan tugas terstruktur dan mandiri tidak terstruktur alokasi hanya 0-50% dari alokasi waktu yang ada dari tatap muka. Mohon penjelasan yg lebih detail tentang hal itu. Mengapa kita harus dibatasi 0-50%. Apakah tidak dibebaskan kepada guru ?. Karena tugas terstruktur atau tidak toh siswa akan melakukan aktifitas di luar jam tatap muka atau di rumah.
- Penetapan KTSP sebenarnya oleh siapa : kepala sekolah / Dinas Pendidikan / komite sekolah ?. Jangan sampai pemahaman yang disampaikan itu berbeda dengan pemahaman yang diterima peserta yang pernah memperoleh informasi dari LPMP.
- Berkaitan dengan pemenuhan kewajiban guru untuk mengajar sebanyak 24 jam/minggu, apakah harus dilakukan ? sementara di Papua belum menerapkan sertifikasi guru.
- Kami memiliki jumlah guru yang terbatas yaitu 5 orang saja. Dari jumlah guru tersebut sekolah kami tidak punya guru bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, penjaskes. Bagaimana cara menyusun KTSP dengan kondisi sekolah yang kekurangan jumlah pendidik semacam ini ?
- KTSP identik tergantung siapa yang akan memakainya. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah yg fleksibel dan memberi otonomi, tetapi ada Ujian Nasional (UN). Hal ini apakah tidak rancu di satu sisi sekolah diberi otonomi namun di sisi lain harus ada ujian standar yaitu UN.
- Bagaimana dengan kondisi sekolah yang di pelosok dan di pedalaman yang serba kurang namun akan dilakukan UN yang sama dengan sekolah di perkotaan ?
- IPA Terpadu, pada tahapan penyusunan silabus dengan RPP tidak berbeda dengan langkah tematis di SD. Dari SI dibuat indikator, dan semua KD dibuat indikator-indikator. Dari beberapa indikator yang dibuat tema yang dapat mengkaitkannya, bagaimana membuat tema untuk KD dan indikator yang dapat dikelompokkan di semester yang sama atau berbeda.
- Secara rasional untuk pembelajaran terpadu, memungkinkan untuk efisiensi indikator bilamana terjadi indikator yang tumpang tindih sehingga dapat diajarkan pada salah satu mata pelajaran saja dan tidak berulang. Tetapi bagaimana praktis pelaksanaannya ?
- Substansi IPA adalah terpadu, sementara model silabus pada panduan penyusunan KTSP yang dikeluarkan BSNP belum terpadu. Apakah Terpadu ini menjadi suatu keharusan untuk IPS dan IPA diterapkan atau penerapannya dapat berlangsung secara bertahap ?
- Dari LPMP diinformasikan harus melaksanakan IPA dan IPS terpadu, maka seandainya jika tidak ada guru bidang itu maka guru dalam bidang yang lain harus mengajarkannya.
- Struktur KTSP untuk SMK. Dalam struktur KTSP ada mata pelajaran, mulok, pengembangan diri. Di SMK ada pelajaran normatif, adaptif, dan normatif. Ada belajar mata pelajaran baru yaitu IPS, seni dan budaya. Dimasukkan di dalam normatif, adaptif, atau dalam kelompok tersendiri.
- Dalam proses pembelajaran perlu ada motivasi belajar untuk siswa. Dalam rapor tidak ada rangking. Ranking masih dianggap sebagai motivasi dalam belajar peserta didik.
- KTSP dibuat oleh sekolah atau beberapa sekolah. Kalau dibuat oleh MGMP boleh atau tidak?

- KTSP dilaksanakan di daerah, dengan bahan-bahan yang relevan dengan kondisi daerah. Aka tetapi ujian masih nasional dan soal disusun secara nasional. Bagaimana hal ini dapat dilaksanakan?
- Pada tahun 2008 apakah SD sudah melaksanakan ujian nasional untuk tiga mata pelajaran (IPA, Matematika, dan Bahasa)?
- Pengajaran bahasa Inggris kiblarnya berbeda. Kurikulum 1994 kiblarnya Inggris, yaitu pendekatan tematik dengan mengutamakan keterampilan bahasa, sekarang kiblarnya memahami bermacam-macam teks dan guru-guru memperoleh pelatihan tersebut. SMA merupakan jenjang pendidikan yang dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di SMA tidak ada teori tata bahasa. Masalahnya yaitu PT masih melakukan tes pada calon mahasiswanya untuk test kognitif. Bagaimana mereka dapat diterima di PT?
- Bukit tinggi telah menggunakan LHB yang dikeluarkan oleh Puskur. Apakah ada ketentuan bahwa LHB harus dicetak atau dalam bentuk lembaran-lembaran? Hal tersebut menjadi masalah. Bukti Tinggi membuat LHB dalam bentuk lembaran, sementara ketika pindah ke kabupaten lain, kami dilecehkan dan bahkan kepala dinasnya bertanya mengapa LHB dibuat main-main, yaitu dalam lembaran-lembaran? Mereka malah menginginkan LHB dibuat sesuai dengan sekolah yang dituju oleh anak untuk pindah sekolah.
- KKM sudah ditentukan, setelah tuntas dilakukan penilaian oleh guru, siswa dapat menjawab dengan baik Tetapi kenapa ketika UUB siswa tidak mampu menjawab?
- Kota Bukit Tinggi melaksanakan KTSP pada tahun ajaran 2007/2008. Setelah memperoleh pelatihan ternyata dirasakan KTSP yang disusun masih jauh dari sempurna. Selain itu juga melaksanakan ketentuan mengajar minimal tiap guru 24 jam tatap muka perminggu. Harapannya kurikulum jangan berubah lagi.
- Apakah boleh kita belum melaksanakan KTSP tahun 2009 karena satu sekolah hanya di ajar oleh 2 guru?
- KTSP dilaksanakan di daerah, dengan bahan-bahan yang relevan dengan kondisi daerah. Aka tetapi ujian masih nasional dan soal disusun secara nasional. Bagaimana hal ini dapat dilaksanakan?
- Ujian nanti dalam bentuk apa? Apakah betul ada tambahan mata pelajaran yang di UN kan?
- Apakah sistem penilaiannya sama dengan KBK?
- Mengapa penilaian terlalu rumit? Bagaimana kita bisa menilai seluruh kelas yang jumlahnya banyak sekali?
- Kita mengalami kendala kurangnya bukumata pelajaran untuk anak-anak. Jadi siswa hanya mencata terus padahal materi terlalu banyak. Siswa sulit memahami materi pelajaran.
- Bagaimana menintegrasikan *life skill* kedalam silabus? Kita tidak memiliki pedoman apa saja life skill itu. Kami mau memasukkannya.
- Kalau guru harus membuat silabus dan RPP sendiri, pekerjaan guru banyak sekali, bagaimana dengan kesejahteraannya?
- Bagaimana kita mengajarkan kalau membaca dan menulis mereka belum bisa padahal sudah di SMA?
- Apakah mungkin Papua ini diberikan perlakuan khusus yang tidak sama dengan daerah lain karena kondisi siswa sangat berbeda dengan daerah lain.
- Kenapa pemerintah tidak memberikan bantuan yang banyak sehingga siswa dapat membeli buku atau buku dikirim dari pemerintah?

- Siswa sulit membayar uang SPP sehingga untuk operasional sekolah juga menjadi terganggu.
- Letak sekolah saling berjauhan. Ada yang berjarak tempuh dengan kendaraan sepeda motor selama 12 jam. Hal tersebut menyebabkan jika ada undangan ke kabupaten sulit untuk mengundang mereka. Apalagi ada yang harus menggunakan speed boat yang biaya minyaknya saja satu kali jalan Rp1 juta. Apakah tidak ada tunjangan khusus bagi guru seperti itu?
- Menurut Guru agama :”Mampu mengartikan ayat al Quran, kan tidak mungkin karena berbagai latar belakang”. Menurut peserta Saran mengartikan ayat Al Quran Kegiatan guru lebih menonjol, gimana? Gimana memberi nilai? Kapan 1,2 . Bobot tidak jelas, bagaimana?
- Skor dan bobot, mana yang paling tepat menentukan skor atau bobot? Skor dan bobot menjadi masalah. (Guru tidak bisa membedakan antara skor dan bobot). Permasalahan ini dijawab oleh peserta lainnya dan diperjelas oleh tim Puskur.
- Permasalahan yang sering muncul dalam pelatihan /bimbingan profesional ialah pada Penilaian, seperti mengapa penilaian masih saja dilakukan di tingkat nasional dan tidak pada tingkat satuan pendidikan? Pertanyaan ini juga diikuti dengan mengapa kok hanya tiga matapelajaran itu saja dan mengapa tidak semuanya saja? Pertanyaan tentang penilaian juga menyangkut tentang pembuatan skor, membuat pembobotan, dan menentukan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), Peserta pada sekolah paling baikpun tidak dapat membedakan antara skor dan bobot, hubungan apa yang terjadi antara skor dan bobot. Pada beberapa sekolah telah melaksanakan KTSP dengan segala keterbatasannya. Masih dalam penilaian , di hampir banyak peserta yang mengikuti pelatihan ini nampaknya sering terhenti dalam menjabarkan indikator yang ada , padahal indikator itu sendiri masih dapat diuraikan lebih rinci dan lebih terukur lagi, seperti pemahaman identifikasi, diskusi, pemaknaan diskusi dan identifikasi dan terminologi lainnya sering berhenti sampai disitu, sehingga pemahaman diskusi maupun identifikasi dipahami secara beragam oleh para peserta.
- Permasalahan peserta dalam pelaksanaan KTSP: Pada sekolah kejuruan ada pemahaman berbeda dengan sekolah umum lainnya, khususnya dalam memahami indikator dan materi, bahkan ada pembiasaan pemahaman pada penjabaran dari Kompetensi dasar pada standar isi ke indikator, beberapa peserta menjabarkannya persis seperti apa yang dicontohkan oleh tabel silabus pada contoh KTSP buatan BSNP, ada yang menjabarkannya dalam bentuk materi.
- Para peserta juga menanyakan apa gunanya dan bagaimana menyusun tujuan pembelajaran dalam RPP, untuk itu dibahas secara bergantian dari peserta ke peserta lainnya memberikan pendapatnya. Seperti tujuan merupakan jalur yang menjadi konsentrasi /fokus guru dalam membelajarkan anak dalam satu event pertemuan. Dicontohkan kepada SMK seperti tujuan pembelajaran listrik yang mempunyai banyak sub topik seperti seri, paralel untuk rangkaian seri sendiri maka judulnya dapat ”Rangkaian Seri” tetapi akan berbeda ketika dalam satu RPP hendak diberikan 2, 3 topik bersama, judul yang diberikan juga tentu akan berbeda, dan itu sangat tergantung dari minat guru, rencana gurunya sesuai dengan teknik, metoda yang disenangi dan dikuasai oleh guru yang bersangkutan. Langkah apa yang harus diambil setelah menetapkan KKM ternyata kondisinya jauh dibawah Standar?
- Kreteria kenaikan kelas, kelulusan tidak boleh ada nilai merah, kalau kita lihat apakah Sekolah boleh menetapkan kreteria kenaikan dan kelulusan.
- Waktu KBK boleh ada 4 mata pelajaran, kemudian Sekarang ada 3 mata pelajaran

- Persyaratan harus dikomunikasikan pada orang tua (Komite)
- Batasannya berapa kali sekolah dapat merubah KKM kalau ternyata kemampuan siswa tidaktuntas (masalahnya bisa direvisi)
- Sosialisasi ini sudah berjalan 2 tahun, ditempat kaki dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut sangat terbatas, dan masih sangat kurang sosialisasinya.
- Mohon kami diberikan literatur yang cukup untuk muatan lokal dan pengembangan diri.
- Di tempat kami penilainnya bervariasi, yaitu Ulangan harian/ tugas , Ulangan tengah semester dan ulangan terakhir. Bobot Skoringnya ketiganya adalah sama. Bagaimana dengan hal tersebut. Karena khususnya tugas yang dilakukan di rumah kadang bukan anak sendiri yang melakukan?
- Ketentuan KKM di sekolah kami maksimal ada 4 matapelajaran, disamping itu ada ketentuan lain kalau siswa kehadirannya kurang dari 85%, maka anak tersebut tidak naik. Sebetulnya saya kurang terima dengan pernyataan ini, kalau menurut Ibu bagaimana? Dan apakah KKM-nya bisa direvisi
- Pada saat kita membuat silabus, di sana ada indikator. Kemudian di dalam menyusun soal disitu ada dinyatakan menyusun indikator. Guru bingung saat menentukan indikator. Indikator mana yang dituangkan. Apakah indikator silabus apa indikator soal
- Mohon perlu dipertegas lagi pada kata operasional khusus atau umum dalam penilaian A,B,C,D (Action. Behavior, Content, dan Degree) atau yang mana ?
- Silabus yang baku seperti apa? Karena sampai saat ini belum ada silabus yang baku.
- Dalam merumuskan Tujuan, apakah harus mengacu pada materi pembelajaran?
- Apakah RPP identik dengan SP pada waktu dulu?
- Penilaian pada raport dulu menilai aspek dalam mata pelajaran kalau yang sekarang seperti apa?
- Apakah dengan KTSP ujian semester ini untuk semua? Pakah boleh dengan sistem blok! Sekolah masih melakukan semester.
- Pembelajaran tematik seperti apa? Dan bagaimana hubungannya dengan penilaian?
- mana yang lebih ideal, apakah ulangan/ujian tengah semester atau ulangan/ujian akhir semester.
- KTSP dibuat oleh sekolah atau beberapa sekolah. Kalau dibuat oleh MGMP boleh atau tidak? Pelaksanaan terakhir yaitu tahun 2009/2010. Kami akan melaksanakannya di kelas I boleh atau tidak
- KTSP dilaksanakan di daerah, dengan bahan-bahan yang relevan dengan kondisi daerah. Aka tetapi ujian masih nasional dan soal disusun secara nasional. Bagaimana hal ini dapat dilaksanakan?
- Pengajaran bahasa Inggris kiblarnya berbeda. Kurikulum 1994 kiblarnya Inggris, yaitu pendekatan tematik dengan mengutamakan keterampilan bahasa, sekarang kiblarnya memahami bermacam-macam teks dan guru-guru memperoleh pelatihan tersebut. SMA merupakan jenjang pendidikan yang dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di SMA tidak ada teori tata bahasa. Masalahnya yaitu PT masih melakukan tes pada calon mahasiswanya untuk test kognitif. Bagaimana mereka dapat diterima di PT
- Bukit Tinggi telah menggunakan LHB yang dikeluarkan oleh Puskur. Apakah ada ketentuan bahwa LHB harus dicetak atau dalam bentuk lembaran-lembaran? Hal tersebut menjadi masalah. Bukit Tinggi membuat LHB dalam bentuk lembaran, sementara ketika pindah ke kabupaten lain, kami dilecehakan dan bahkan kepala

dinasnya bertanya mengapa LHB dibuat main-main, yaitu dalam lembaran-lembaran? Mereka malah menginginkan LHB dibuat sesuai dengan sekolah yang dituju oleh anak untuk pindah sekolah.

- KKM sudah ditentukan, setelah tuntas dilakukan penilaian oleh guru, siswa dapat menjawab dengan baik Tetapi kenapa ketika UUB siswa tidak mampu menjawab?
- Kota Bukit Tinggi melaksanakan KTSP pada tahun ajaran 2007/2008. Setelah memperoleh pelatihan ternyata dirasakan KTSP yang disusun masih jauh dari sempurna. Selain itu juga melaksanakan ketentuan mengajar minimal tiap guru 24 jam tatap muka perminggu. Harapannya kurikulum jangan berubah lagi.
- KTSP dibuat oleh sekolah atau beberapa sekolah. Pelaksanaan terakhir yaitu tahun 2009/2010. Kami akan melaksanakannya di kelas I boleh atau tidak?
- KTSP dilaksanakan di daerah, dengan bahan-bahan yang relevan dengan kondisi daerah. Akan tetapi ujian masih nasional dan soal disusun secara nasional. Bagaimana hal ini dapat dilaksanakan?
- Bagaimana cara menentukan KKM? Berapa kriteria minimalnya?
- Kabupaten Natuna melaksanakan KTSP pada tahun ajaran 2007/2008. Tetapi perangkatnya belum selesai. Boleh atau tidak?
- Siapa yang menentukan muatan lokal? (Lisharmanan Lubis, SMAN 1).
- Kurikulumnya KTSP (daerah), ujian nasionalnya bagaimana?
- Bagaimana struktur kurikulum SMK berbasis Kelautan? Bolehkah mata pelajaran Seni Budaya diganti dengan pelajaran khusus kelautan?
- Bolehkah nilai KKM lebih kecil dari 60?
- Kapan KTSP diberlakukan?
- Dapatkah menulis persiapan bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris?
- Bagaimana cara mengatasi kekurangan alat peraga, alat praktikum, dan media, misalnya pada pembelajaran kimia yang harus melakukan praktikum?
- Bagaimana cara mengajarkan IPA terpadu pada jenjang SMP? Karena tidak semua guru mampu menguasai fisika/kimia/biologi?
- Bagaimana cara merumuskan indikator?
- Memahami pesan yang ada dalam "uyon-uyon" memang agak sulit dilaksanakan karena anak SMA/SMK jaman sekarang sulit untuk dibawa pada budaya Jawa. Begitu pula memahami pesan yang ada pada pesan moral pada "mocopat". Jangan memahami tetapi sekedar mendengarkan atau mengenal saja.
- Kelas XI pada tema "sesorah" sudah ada CDnya, paling tidak anak bisa menjadi MC dalam bahasa Jawa. Tetapi paling tidak adalah pengenalan pada anak dan jangan sampai budaya Jawa khususnya Jogja itu tidak dikenal oleh anak.
- *Action plan* berkaitan dengan tugas kita sebagai pengembang KTSP lebih lanjut
- KTSP dibuat oleh sekolah atau beberapa sekolah. Kalau dibuat oleh MGMP boleh atau tidak? Pelaksanaan terakhir yaitu tahun 2009/2010. Kami akan melaksanakannya di kelas 1 boleh atau tidak?
- KTSP dilaksanakan di daerah, dengan bahan-bahan yang relevan dengan kondisi daerah. Akan tetapi ujian masih nasional dan soal disusun secara nasional. Bagaimana hal ini dapat dilaksanakan?
- Ujian dilaksanakan secara nasional, sementara materi ditetapkan di sekolah. Mana yang akan diujikan?
- Apakah sistem penilaiannya sama dengan KBK?
- Mengapa siswa sulit menerima pelajaran? Apakah terlalu banyak materi atau materinya terlalu sulit?

- Materi sangat sulit diajarkan. Apa kita dapat menyelesaikan semua kompetensi? Saya kira sulit mencapai kompetensi yang berkaitan dengan keterampilan. Pengetahuan saja sulit apalagi yang berkaitan dengan keterampilan. Apalagi dengan praktek, waktu sangat kurang.
- Bagaimana menintegrasikan life skill kedalam silabus? Kita tidak memiliki pedoman apa saja life skill itu. Kami mau memasukkannya.
- Kalau guru harus membuat silabus dan RPP sendiri, pekerjaan guru banyak sekali, bagaimana dengan kesejahteraannya?
- Mata pelajaran keterampilan di berikan disatu pendidikan yang lebih rendah atau LB, di SMA sebagai MP Tambahan, bagaimana di sekolah sekalian mata mulok juga ada keterampilan? Bagaimana keduanya diberikan di sekolah?
- Penugasan terstruktur dan mandiri tidak terstruktur. Dalam memberikan tugas terstruktur dan mandiri tidak terstruktur alokasi hanya 0-50% dari alokasi waktu yang ada dari tatap muka. Mohon penjelasan yg lebih detail tentang hal itu. Mengapa kita harus dibatasi 0-50%. Apakah tidak dibebaskan kepada guru? Karena tugas terstruktur atau tidak toh siswa akan melakukan aktifitas di luar jam tatap muka atau di rumah.
- Pengembangan Diri (terprogram dan tidak terprogram). Tidak terprogram alokasi waktu ekuivalen 2 jam. Di sekolah ditetapkan 2 jam apakah 1 jenis atau beberapa macam beberapa jam, sementara ada kewajiban guru negeri sejumlah 24 jam/minggu . Pramuka, seni, olah raga apakah masing-masing guru mendapatkan masing-masing jumlah 2 jam.
- Bahan ajar: persoalan di Papua masalah bahan ajar menjadi sesuatu yang penting. Dalam PKn dulu ada materi tentang Keyakinan, sedangkan sekarang bahannya ada tentang konstitusi di mana di sekolahnya belum ada bahan ajar yang berkaitan tentang materi itu. Sehingga guru mengharapkan ada bahan ajar (buku) yang cocok.
- Penetapan KTSP sebenarnya oleh siapa: kepala sekolah / Dinas Pendidikan/komite sekolah? Jangan sampai pemahaman yang disampaikan ibu berbeda dengan pemahaman yang diterima peserta yang pernah memperoleh informasi dari LPMP.
- Berkaitan dengan pemenuhan kewajiban guru untuk mengajar sebanyak 24 jam/minggu, apakah harus dilakukan ? sementara di Papua belum menerapkan sertifikasi guru.
- Kami memiliki jumlah guru yang terbatas yaitu 5 orang saja. Dari jumlah guru tersebut sekolah kami tidak punya guru bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, penjaskes. Bagaimana cara menyusun KTSP dengan kondisi sekolah yang kekurangan jumlah pendidik semacam ini ?
- Standar Nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi pengelolaan diserahkan kepada daerah/sekolah. Bagaimana hal ini akan nyambung? Apalagi ujian nasional masih disusun dan dilaksanakan oleh pusat. Apa bisa bagus hasilnya?selain itu target nilai juga tinggi, daerah tidak bisa mengikutinya.
- IPA terpadu ini bagaimana melaksanakannya? Materinya katanya terpadu, tetapi ternyata masih sendiri-sendiri antara biologi, fisika, dan kimia. Bagaimana memadukannya? Kalau dipadukan siapa yang mengajar?
- Kalau IPA terpadu dibuat tema, lalu memadukannya dari indikator atau dari KD?
- Indikator tidak semua bisa dipadukan, siapa yang mengajar yang terpadu dan siapa yang mengajar yang terpadu.

- Jika sendiri-sendiri, kemudian di akhir semester dipilih satu tema pemersatu, berarti menambah alokasi waktu. Selain itu, siapa yang mengajar yang terpadu?
- Menurut kesepakatan dengan LPMP ketika pelatihan, biar saja guru biologi mengajar fisika atau sebaliknya agar ketentuan minimal mengajar bisa tercapai. Bagaimana ini? Manakah yang harus kita lakukan?
- Pelaksanaan terakhir yaitu tahun 2009/2010. Jika tidak siap boleh atau tidak?
- KTSP dilaksanakan di daerah, dengan bahan-bahan yang relevan dengan kondisi daerah. Akan tetapi ujian masih nasional dan soal disusun secara nasional. Bagaimana hal ini dapat dilaksanakan?
- Bagaimana cara menentukan KKM? Berapa kriteria minimalnya?
- Kabupaten Merauke melaksanakan KTSP pada tahun ajaran 2007/2008. Tetapi perangkatnya belum selesai. Boleh atau tidak?
- Siapa yang menetapkan KTSP? Menurut LPMP dinas yang menetapkan.
- Siapa yang menentukan muatan lokal? Kurikulumnya KTSP (daerah), ujian nasionalnya bagaimana? Bolehkah nilai KKM lebih kecil dari 60?
- Kapan KTSP diberlakukan?
- Bagaimana cara penilaian pada tematik?
- Bagaimana cara mengatasi kekurangan alat peraga, alat praktikum, dan media, misalnya pada pembelajaran kimia yang harus melakukan praktikum?
- Bagaimana mengajar IPA terpadu? Sulit jika mengikuti standar isi karena tiap semester berbeda gurunya.
- Bagaimana cara mengajarkan IPA terpadu pada jenjang SMP? Karena tidak semua guru mampu menguasai fisika/kimia/biologi?
- Bagaimana cara merumuskan indikator?
- KTSP dilaksanakan di daerah, dengan bahan-bahan yang relevan dengan kondisi daerah. Akan tetapi ujian masih nasional dan soal disusun secara nasional. Bagaimana hal ini dapat dilaksanakan?
- KTSP dibuat oleh sekolah atau beberapa sekolah. Kalau dibuat oleh MGMP boleh atau tidak? Pelaksanaan terakhir yaitu tahun 2009/2010. Kami akan melaksanakannya di kelas I boleh atau tidak?
- Siapa yang menyusun KTSP?
- Siapa yang menetapkan KTSP?
- Bagaimana menetapkan KKM?
- KKM bagus, tetapi kalau hasil pelaksanaannya terlalu jauh dengan KKM bagaimana? Apakah KKM boleh diturunkan?
- Apakah boleh menetapkan KKM 50%?
- Setelah tuntas dilakukan penilaian oleh guru, siswa dapat menjawab dengan baik tetapi kenapa ketika UUB siswa tidak mampu menjawab?
- Kabupaten Sikka melaksanakan KTSP pada tahun ajaran 2007/2008. Setelah memperoleh pelatihan ternyata dirasakan KTSP yang disusun masih jauh dari sempurna. Apakah boleh menetapkan sendiri pelaksanaannya tidak mengikuti Dinas?
- Mengapa format silabus berubah-ubah? Bingung
- KBK belum selesai kok sudah KTSP? Bagaimana dengan buku yang sesuai untuk KTSP?
- Berkaitan pembelajaran IPS terpadu, apakah seorang guru harus menguasai IPS secara utuh, padahal guru hanya menguasai satu antara Sejarah, Ekonomi, atau Geografi?

- Apakah life skill berarti siswa sudah siap kerja? Apa bedanya dengan SMK?
- KTSP tidak berlaku di Malaysia, hanya ada PGSLP, tapi pendidikan cukup sukses? Di Malaysia guru berpendapatan tinggi, dan pendidikan sukses?
- Pengembangan diri sebagai bagian dari KTSP, bagaimana pelaksanaannya di sekolah?
- KTSP terlalu padat hingga berpengaruh terhadap anggaran sekolah (untuk SMA)?
- Program tematis dalam buku teks pada umumnya masih terpilah-pilah? Perlu bahan ajar yang lebih komunikatif?
- Bagaimana jika kriteria ketuntasan minimal (KKM) tidak tuntas pada beberapa kompetensi dasar (KD)?
- Pada contoh penilaian di mata pelajaran matematika/IPA, diperoleh nilai 80 untuk pemahaman konsep atau hapalan, sementara keterampilan proses atau bernalar hanya memperoleh nilai 20. Apa siswa tetap lulus dengan nilai 20 dalam bernalar?
- Apa KD yang sudah tuntas perlu diujikan lagi pada ujian semester?
- Bagaimana mengelompokkan siswa sesuai minat dan bakat pada Pengembangan Diri?
- Apa yang dimaksud dengan program kegiatan Pengembangan Diri?
- Bagaimana dengan guru Pengembangan Diri pada bidang olah raga yang ternyata tidak kualified (loyo)?
- Bagaimana dengan 'kecakapan hidup' yang tidak sesuai dengan indikator?
- Bagaimana solusi untuk memenuhi pemenuhan SDM maupun sumber dana bagi pelaksanaan mulok yang memenuhi keperluan daerah ?
- Dari Pusat seyogya nya ada penekanan/ mengharuskan pada daerah untuk masing-masing memiliki keunggulan daerah tersebut
- Bila mulok tidak terlaksana sesuai dengan program karena pengaruh alam sehingga ada pelaksanaannya yg diundutr apakah boleh, misal Pertanian seharusnya ada praktek tetapi karena musim jadi praktek ditiadakan, apakah boleh ?
- Kurikulum Sekarang bersifat coba-coba / angan-angan , jadi kapan hal itu bisa tercapai sesuai dengan visi dan misi sekolah
- Pelaksanaan kurikulum seharusnya dimulai dengan contoh, tetapi bagaimana pendidikan berjalan baik bila kita sendiri bertindak tidak sesuai dengan program yang direncanakan contoh : merokok dalam kelas, sidang, dll.
- Pembinaan komponen pendidikan belum menyeluruh, jadi jangan diharap hasilnya akan baik.
- Bagaimana contoh konkret hubungan KTSP dengan visi dan misi , mutu pendidikan dalam kegiatan
- Bagaimana mengintegrasikan visi dan misi tersebut dalam KTSP
- Pencapaian harus berapa lama waktunya, bila 1 semester belum tercapai apakah diteruskan pada semester berikutnya.
- Bagaimana cara memilih mulok dan pengembangan diri .
- Bagaimana hubungan antara Mulok & Unggulan lokal dengan warna pendidikan
- Kriteria kenaikan kelas menurut juknis boleh 3 MP yang tidak kompeten, tetapi bila kenyataan di sekolah dengan kriteria itu masih banyak yang tidak naik, apakah boleh diturunkan , mis menjadi 4 MP ?
- Apakah muatan lokal dilakukan boleh secara terus menerus dua semester atau satu semester saja?
- Apakah program SKS merupakan wacana saja atau akan ada beneran?
- Bagaimana dengan kedudukan program akselerasi itu dikaitkan dengan SKS?

- Apakah Visi dan misi dari suatu sekolah dapat berubah ?
- Apakah boleh MGMP menyusun KTSP?
- Beban mengajar, apakah 24 jam perminggu sudah harus diterapkan?
- Pemahaman materi minimal kompetensi kelulusan minimal?
- MBS di TK atau PAUD (KB) di kabupaten Sikka belum bisa berjalan dengan baik, karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anaknya. Berbagai usaha sudah dilakukan dengan komite sekolah tetapi hasilnya tanggapan positifnya masih di bawah standar. Usaha apa yang hendaknya kami lakukan agar masyarakat merespon positif terhadap pendidikan TK dan PAUD?
- Guru TK dan PAUD yang dipilih untuk mengikuti pelatihan, baik itu pelatihan tentang kurikulum maupun pengembangan kreatifitas, biasanya hanya 2 orang atau 3 orang saja yang dikirim ke propinsi. Hampir tidak pernah kami PAUD maupun TK swasta mendapatkan pelatihan. Jika ada pelatihan di kabupaten Sikka selalu atas swadaya sendiri, yang biasanya setiap orang membayar Rp.25.000,- sehari. Ini terasa berat karena gaji/honor guru jauh di bawah standar. Apakah pelatihan atau pengembangan PAUD untuk para guru dan tutor tidak bisa direncanakan kami secara merata?
- Pada tahun ini Dinas kabupaten Sikka sudah memberi perhatian pada PAUD yaitu dengan adanya pemberian bantuan dana rintisan pada KB sebesar Rp.20.000.000,-. Selain itu semangat para guru dan tutor PAUD formal dan non formal patut diberi acungan jempol. Walau IGTK kabupaten Sikka belum dilantik ketua dan pengurusnya serta tidak ada dana kegiatannya tetap berjalan dengan baik.
- Masyarakat maupun Dinas kurang memberi perhatian pada pengembangan PAUD. Hal ini mungkin disebabkan karena keadaan sosial ekonomi masyarakat yang rendah, sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah PNS, nelayan, petani dan tukang kayu, atau karena PAUD sifatnya tidak wajib. TK negeri jika minta sumbangan pada orang tua selalu keberatan. TK negeri kok ada bayaran. Kenapa TK tidak ada dana BOS? MGMP SD jika membahas silabus suka mendapat dana. Mengapa TK tidak?
- PAUD selama ini belum ada acuan kurikulum seperti di TK. Di Kabupaten Muaro Jambi menggunakan kurikulum TK yang direndahkan kemampuan dasarnya. Apakah tidak ada kurikulum untuk PAUD non formal?
- Terjadi gesekan antara PAUD dan TK. Dalam satu kelurahan terdapat beberapa tempat PAUD dan TK, menyarankan agar pusat membuat kebijakan yang mengatur jarak lokasi PAUD dan TK dalam satu lokasi.
- Apakah tenaga pendidikan di PAUD sifatnya memang sukarela? Selama ini PAUD tidak ada program pengajarannya, apakah memang harus ada program pengajarannya?
- Berdasarkan hasil penjelasan, terlihat bahwa penilaian PAUD persis seperti di TK. Apakah administrasi penilaian dan pembelajaran PAUD harus dituntut seperti TK ?
- Bagaimana persyaratan penyelenggaraan PAUD?
- Di Kabupaten Pangkep pendidikan SD, SMP, SMA gratis, maksudnya tidak ada SPP dan adanya BOS buku, sehingga bukupun gratis. Sedangkan, PAUD dari segi dana kurang diperhatikan. Dari Pemda Rp.80.000,- per KB (1 KB terdiri atas 5 tutor). Yang membuat semangat para tutor PAUD adalah adanya dana rintisan Rp.10.000.000,- yang setiap tahunnya hanya diperuntukkan untuk beberapa PAUD dan dana kelembagaan Rp.3.000.000,- per KB dari Pemda untuk semua KB. Apakah tidak sebaiknya PAUD formal dan non formal diberikan dana BOS juga.

- Penilaian jika dibuat per individu dengan berbagai bentuk alat penilaian seperti observasi, catatan anekdot, unjuk kerja, hasil karya, dsb akan sangat merepotkan guru dan memberatkan guru. Apakah boleh jika kita cukup hanya membuat penilaian di SKH saja?
- Saya sangat senang dengan berdirinya Direktorat PAUD yang lebih memperhatikan anak-anak usia balita. Apakah di Indonesia negara tercinta kita ini tidak memungkinkan dalam satu lembaga pendidikan itu ada SD, TK, KB dan TPA, seperti studi banding yang saya lakukan di South Australia, mengingat pada jenjang pendidikan tsb pendekatan pembelajarannya adalah bermain sambil belajar?
- Masyarakat sangat menyambut baik adanya PAUD di masyarakat, tetapi para pelaksana lapangan seringkali terjadi silang pendapat antara keberadaan TK dan PAUD (KB/Pos PAUD) yang pada umumnya ditangani oleh PLS.
- Apa perbedaan antara TK dan KB?
- Animo masyarakat terhadap pengembangan PAUD yang bekerjasama dengan PKK sangat baik. Namun masih banyak masyarakat di desa belum memahami PAUD, apakah PAUD harus ke TK dulu baru boleh ke SD?
- Kebanyakan tutor KB itu statusnya tenaga abdi, apakah bisa menjadi guru honor?
- Wisuda bagi anak yang lulus TK boleh atau tidak?
- Apakah penilaian untuk PAUD bisa dibuat lebih sederhana, misalnya dicantumkan pada silabus semester/bulanan/mingguan?
- Apakah untuk tutor PAUD harus perempuan, kalau bapak-bapak bagaimana?
- Jumlah anak dalam satu kelas 40 anak dan guru hanya satu. Bagaimana solusi mengelola kelas besar dengan model pengembangan berdasarkan minat, mengingat terlalu banyak area yang ada dan anak akan tersebar di berbagai area tersebut?
- Bagaimana mengatasi anak yang lebih tertarik pada sudut pengembangan/ pusat minat?
- Setiap tahunnya ada saja anak yg hiperaktif, mainan yg telah diletakkan di sudut sering diberantakkan? Bagaimana menangani anak hiperaktif?
- Di Kelompok Bermain masih memakai silabus yang umum seperti TK. Apakah format silabus untuk Kelompok bermain sama dengan TK?
- Apakah untuk usia 2-3 tahun jumlah temanya dalam satu semester harus 8?
- Tadi dikatakan bahwa masa golden age itu anak usia 0-8 thn dan pembelajarannya sama-sama tematik. Bagaimana menurut ibu agar pembelajaran Tematik di PAUD bisa berkelanjutan di SD sehingga pelajaran terlihat saling berkesinambungan?
- Apakah pembelajaran tematik di SD tidak jalan karena kurangnya sosialisasi?
- Berikan contoh kalau memang anak yang pernah mengikuti PAUD lebih siap bersekolah dibandingkan dengan anak SD!
- Apakah dalam SKM dengan indikator mendengarkan cerita harus kita tuliskan judul ceritanya?
- Apakah dalam penyusunan SKM model pembelajaran minat boleh memasukkan berbagai aspek pengembangan pada satu area? Misalnya pada area seni dicantumkan indikator dari aspek kognitif, ataupun fisik motorik?
- Di Kabupaten Muaro Jambi PAUD berkembang sangat pesat, yaitu ada Kelompok Bermain, TPA dan PAUD terintegrasi.
- PAUD selama ini belum ada acuan kurikulum seperti di TK. Di Kabupaten Muaro Jambi menggunakan kurikulum TK yang direndahkan kemampuan dasarnya. Apakah tidak ada kurikulum untuk PAUD non formal?

- TK atau PAUD sejak tahun 2006 mendapat bantuan dana dari pemerintah baik itu berupa block grand maupun dana perintisan untuk PAUD. Menyarankan agar tidak ada dana dari pemerintah, karena dapat menimbulkan korupsi dan KKN di lembaga pendidikan yang dapat merusak bangsa.
- Bolehkah PAUD mengeluarkan Surat Keterangan belajar?
- PAUD terintegrasi di Muara Jambi tumbuh seperti jamur, namun sampai sekarang kurang perhatian dari pihak dinas dan Pusat dalam hal pelatihannya. Kami ingin agar PAUD diberi kesempatan berkembang/maju sama seperti TK.
- PAUD di Muaro Jambi pada umumnya biaya pendidikannya gratis. Apakah untuk ketentuan administrasi, cara penilaian pembelajarannya harus sama?
- Mengingat PAUD di Muaro Jambi adalah gratis, sehingga lebih diminati oleh orangtua. Bagaimana mengatasi agar TK-TK yang ada juga mendapat murid?
- Tenaga pengajar PAUD pada umumnya adalah Ibu-ibu Rumah Tangga (Ibu PKK) dimana pada umumnya sulit membuat suatu pembelajaran yang PAKEM. Bagaimana cara mengatasinya, bisakah ibu memberikan pelatihan ini pada kami?

BAB III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Dalam kegiatan pengembangan profesionalisme di kabupaten/kota dapat disimpulkan antara lain:

1. Tingkat pemahaman TPK terhadap kebijakan pengembangan dan penyusunan KTSP bervariasi, antara lain pemahaman masih kurang memadai bahkan masih dalam tahap sosialisasi, kemampuan cukup memadai dan masih memerlukan bimbingan dan pelatihan, serta kemampuan cukup memadai namun masih harus memperoleh pelatihan dan pemantapan serta pembinaan dari Pusat agar dapat menjamin pelaksanaan KTSP di satuan pendidikan lebih baik.
2. Surat Edaran Menteri No. 33 Tahun 2006 ayat ... tentang Tim Pengembang Kurikulum kabupaten/kota menyatakan bahwa daerah perlu membentuk TPK untuk setiap Kab/kota yang dikuatkan dengan SK yang ditandatangani oleh Bupati/walikota. Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan kegiatan bantuan profesional terdapat variasi keberadaan TPK di daerah yaitu Kabupaten/kota yang belum membentuk TPK, Kabupaten/kota yang sudah memiliki TPK dengan SK dari Dinas Pendidikan Setempat, dan Kabupaten/kota yang telah memiliki TPK dengan SK Bupati .
3. Salah satu hasil yang diharapkan dalam kegiatan bantuan profesionalisme adalah TPK menyiapkan program kerja dalam rangka pengembangan KTSP di daerahnya. Berdasarkan informasi diperoleh bahwa beberapa daerah telah menyiapkan program untuk mengembangkan KTSP. Daerah tersebut antara lain dari Kab. Natuna, Kab. Merauke, Kab. Sorong Selatan, Kab. Bitung, Kab. Pandeglang, Kab. Pangkep, kab. Kepulauan Seribu, Kota Tebing Tinggi, Kab. Bantul, Kab. Sambas, Kab. Lombok Timur, dan Kota Dumai.
4. Salah satu tugas TPK adalah untuk mendampingi satuan pendidikan di wilayahnya dalam mengembangkan KTSP, memverifikasi KTSP yang telah disusun oleh satuan pendidikan, dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KTSP. Berdasarkan hasil workshop diperoleh informasi bahwa kemampuan TPK masih bervariasi dalam mengembangkan KTSP. Sebagian besar mereka masih mengadopsi dari contoh model yang telah disediakan, terdapat daerah yang memahamai KTSP hanya pada bagian dokumen II yaitu silabus dan RPP. Mereka belum memahami bahwa KTSP terdiri dari Dokumen I dan II, dan terdapat TPK yang mengembangkan KTSP dengan berpedoman pada kurikulum 2004 (KBK) bukan SI dan SKL.
5. Dari hasil workshop diperoleh gambaran bahwa para peserta masih belum secara maksimal dapat mengerjakan tugas terutama dalam hal memilih mata pelajaran muatan lokal dan menentukan SK dan KD yang sesuai dengan mata pelajaran yang dipilihnya, konsep pengembangan *life skill* belum dipahami sehingga mempengaruhi dalam workshop pengembangan KTSP, masih mendapat kesulitan dalam mengembangkan model atau contoh program pengembangan diri, mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran tematik SD, mengalami kebingungan dan kesulitan dalam menyusun dan mengembangkan pembelajaran IPA dan IPS terpadu SMP.
6. Belum tersedianya standar isi untuk program C, C1, D1, dan G sehingga menyulitkan kelompok PLB mengembangkan KTSP
7. masih ditemukan persoalan dan kendala dalam memahami dan melaksanakan kebijakan KTSP terutama dalam tingkat pemahaman kebijakan KTSP belum

memadai karena kendala akses informasi, letak sekolah yang sangat jauh dari Dinas Pendidikan setempat bahkan berada di pulau lain menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi, kurangnya fasilitas buku ajar, kurangnya sarana dan prasarana sekolah yang mendukung pelaksanaan kegiatan di sekolah, pemahaman KTSP DI SMK belum maksimal dan kurangnya buku yang menunjang terutama buku program produktif, Tidak ada dukungan dana, masih kurangnya kontribusi komite sekolah berkaitan dengan penyusunan dan pengembangan KTSP, pemilihan TPK yang tidak obyektif dan tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan sehingga pada saat pelatihan berjalan kurang maksimal, terbatasnya tenaga Guru di daerah pinggiran, cara menentukan KKM, cara merumuskan Indikator, kurangnya SDM Guru untuk mata pelajaran olahraga,

8. Terdapat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan kebijakan dan pengembangan KTSP seperti mengapa di kejuruan ada IPA dan juga ada biologi, fisika, dan kimia, mengapa di SMK terdapat mata pelajaran IPS, bahasa psikologi dalam pengembangan diri sulit dipahami, bagaimana kedudukan program akselerasi itu dikaitkan dengan SKS, hubungan antara Mulok & Unggulan lokal, tentang lama pencapaian kompetensi, bila 1 semester belum tercapai apakah diteruskan pada semester berikutnya, apa KD yang sudah tuntas perlu diujikan lagi pada ujian semester.
9. Umumnya PAUD formal di 17 Kabupaten/kota menggunakan Kurikulum TK 2004, sedangkan 60% PAUD non formal menggunakan Kurikulum TK 2004 yang kemampuannya diturunkan dan 40% PAUD non formal menggunakan menu generik dan pembelajaran sentra.
10. Selama ini pelatihan untuk PAUD formal secara rutin diperuntukan bagi TK Pembina. TK swasta dan PAUD non formal sangat jarang memperoleh pelatihan dan pembinaan dari dinas Pendidikan atau Pemda setempat.
11. Semangat dan motivasi guru/tutor PAUD formal dan non formal sangat besar dalam mengajar dan meningkatkan pengetahuan secara mandiri, walau kesejahteraan honor dan perhatian dari Dinas Pendidikan atau Pemda setempat masih minim.
12. Untuk keperluan media atau alat peraga pembelajaran pada PAUD non formal pada umumnya membuat sendiri sedangkan pada PAUD non formal membeli buatan pabrik dan membuat sendiri.
13. Bantuan pembinaan pengembangan profesional yang diperlukan oleh pengelola/pelaksana kependidikan di daerah untuk memajukan/memperbaiki PAUD formal/non formal yang diharapkan yaitu: pembinaan profesional yang berkaitan dengan kurikulum dan pembinaan yang sifatnya berkesinambungan
14. Pada umumnya, peserta kegiatan monitoring ini telah mengikuti Workshop Pengembangan Profesional beberapa waktu lalu. Walaupun begitu, beberapa permasalahan yang cukup krusial masih tampak. Antara lain dalam hal pengertian atau konsep mengenai PAUD masih cenderung membedakannya dengan TK. PAUD dianggap sebagai program kegiatan di luar TK, seperti kelompok belajar.
15. Masih tingginya rasio guru-siswa di TK dan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai.
16. Ketidaksiapan para peserta dalam menyajikan pembahasan dalam microteaching, menguatkan dugaan adanya kelemahan dalam penguasaan konsep dan penerapannya dalam program PAUD.
17. Kendala/Kesulitan yang dialami para pendidik PAUD non formal, antara lain :

- kurangnya koordinasi antara pengelola PAUD non formal (KB) dengan Dinas Pendidikan karena belum jelasnya secara struktur pembinaan di Dinas terhadap PAUD non formal.
- Kurangnya pemahaman pengawas/penilik PLS tentang Kebijakan PAUD, Program Kegiatan Belajar, Penilaian di PAUD.
- Masih ada pengawas/penilik PLS di beberapa daerah kabupaten/kota yang belum memahami tugas sebagai pembina PAUD non formal.

B. SARAN/REKOMENDASI

1. SMK masih memerlukan pembinaan dari direktorat kejuruan karena belum memiliki kompetensi bidang keahlian
2. Kemampuan peserta belum merata dan belum mantap sehingga masih perlu pelatihan
3. Sarana Pembelajaran kurang memadai, kurang adanya kreativitas dari guru untuk mengembangkan sarana dan prasarana sendiri secara sederhana dengan bahan yang murah yang dapat diperoleh di sekitarnya
4. Belum mampunya membuat SK dan KD muatan lokal maka perlu dukungan dari dinas pendidikan
5. Karena sosialisasi dari Depag untuk Madrasah dirasakan kurang memadai, maka perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens kepada madrasah
6. Pengembangan diri sulit dipahami bahasa psikologinya sehingga perlu dilengkapi glosari atau sejenis penjelasan yang lain agar mudah dipahami guru.
7. Untuk mengatasi kendala kondisi geografis yang sangat beragam, perlu dilakukan terobosan atau alternatif pendampingan KTSP kepada satuan pendidikan.
8. Dalam kegiatan sosialisasi jarang dilakukan pernah praktek sehingga kemampuan peserta kurang maksimal
9. Motivasi yang dimiliki peserta untuk meningkatkan kemampuan rendah sehingga perlu pembekalan motivasi bagi para pelaksana pendidikan di daerah
10. Hampir semua Dinas Pendidikan kabupaten/kota belum memiliki anggaran dalam persiapan pelaksanaan KTSP sehingga daerah perlu menganggarkannya agar pelaksanaan KTSP lebih maksimal
11. Ketersediaan guru mata diklat seni budaya, bahasa asing dan TIK kelompok SMK belum ada sehingga hal tersebut perlu dipikirkan
12. Masih perlu pemantapan konsep tentang pelaksanaan pembelajaran tematik SD dan IPA/ IPS terpadu.
13. Mengingat pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini sebagai dasar pendidikan dan pengembangan kreativitas anak hendaknya di 17 daerah kabupaten terutama untuk PAUD non formal yang sebagian besar belum memiliki sarana dan prasarana belajar yang memadai, maka perlu memperoleh perhatian yang serius terutama dalam hal sumber belajar, alat peraga, kemampuan guru (termasuk insentif), sarana dan prasarana bermain yang memadai.
14. Para peserta yang diharapkan menjadi tim inti dalam pengembangan kurikulum PAUD, masih memerlukan penajaman lebih lanjut dalam hal konsep dan juga proses kegiatan belajar. Perhatian lebih serius diperlukan dengan melibatkan instansi terkait dalam hal pelaksanaan pelatihan dan pengawasan/monitoring yang lebih intensif agar para peserta bisa dianggap layak untuk mengimbaskan pengetahuan yang telah diperoleh ke sekolah/ lembaga PAUD lainnya.
15. Perlu adanya pengembangan profesional bagi guru TK dan KB untuk mengembangkan bahan ajar.

16. Perlu adanya pengembangan profesional bagi pengembang kurikulum PAUD formal dan non formal baik dari aspek pengetahuan maupun implementasi kependidikannya, baik dengan membentuk TPK PAUD atau hanya melalui forum PAUD/IGTK dst. Selama ini yang mendapat perhatian adalah guru TK PNS sedangkan guru TK swasta masih jarang mendapat perhatian dan kesempatan pelatihan/sosialisasi.
17. Hendaknya Kurikulum atau Standar Isi untuk PAUD formal dan PAUD non formal segera disahkan agar tidak terjadi kebingungan di lapangan.